



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213
Telp. (031) 8941878 – 8963227 Faks : (031) 8926159
E-mail : bpkad@sidoarjokab.go.id website: bpkad.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188.4/354/438.6.2/2023

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pula review / penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud pada konsideren huruf a, dipandang perlu untuk melakukan Review terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Review Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026.

KEDUA : Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD; dokumen penganggaran, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); serta sebagai dokumen pendukung Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 02 Maret 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. 197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19720317 199602 2 001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen **"Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026"** telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada *stakeholders* dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 31 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-I
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	II-I
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	II-1
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	II-22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	II-26
2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur	II-26



BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPKAD	III-I
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur	III-6
3.3.1	Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan	III-6
3.3.2	Telaah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur.....	III-7
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis.....	III-8
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-I
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-I
5.1	Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	V-1
5.2	Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	V-3
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-I
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-I
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-I



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-11
Tabel 2.2 Berdasarkan Usia	II-12
Tabel 2.3 Berdasarkan Masa Purna untuk Lima Tahun Renstra	II-13
Tabel 2.4 Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai BPKAD	II-14
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II-18
Tabel 2.6 Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	II-22
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	II-25
Tabel 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L	II-26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri...	III-7
Tabel 3.4 Telaah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur	III-8
Tabel 3.5 Bobot Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis	III-9
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria.....	III-10
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target.....	IV-3
Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	V-2
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan sasaran organisasi Perangkat daerah (PD)	V-5
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....	VI-4
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (penyesuaian Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.....	VI-13



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten

Sidoarjo yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kinerja Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	I-2
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-2
Gambar 2.2 Persentase Tingkat Pendidikan.....	II-12
Gambar 2.3 Berdasarkan Golongan.....	II-13



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan inti dari perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan strategis ini digunakan sebagai kebutuhan dari organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jika dilihat secara spesifik dalam perencanaan strategis tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat fungsi dari Rencana Strategis (Renstra) yang ditujukan untuk pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah yaitu terdiri dari 5 (lima) tujuan fungsi pokok yaitu:

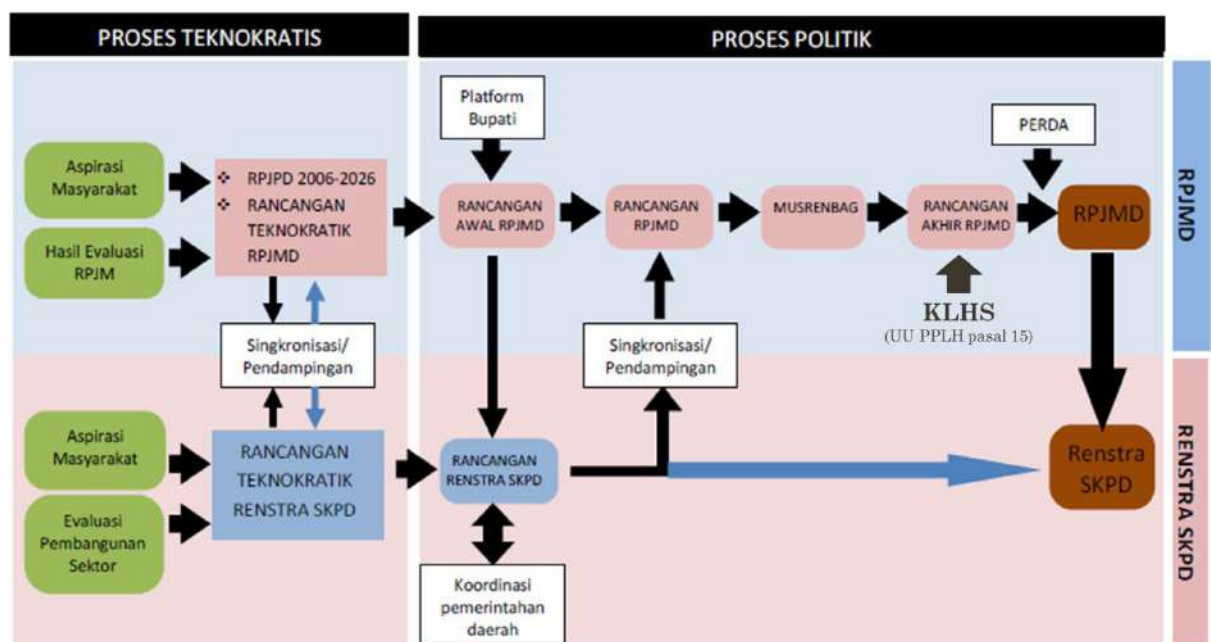
- a. Mendukung Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Berdasarkan fungsi pokok tersebut maka dalam pembuatan Renstra terdapat kesinambungan antara visi, misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyelaraskan pada Perencanaan Strategis yang akan dibuat oleh Perangkat Daerah

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



(PD). Hal ini dilakukan sebagai tujuan tercapainya kinerja yang optimal untuk PD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini merujuk pada kinerja pembangunan secara umum yaitu adanya dua rangkaian proses secara teknokratis dan politis. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD karena keduanya keterkaitan yang begitu erat baik pada konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kinerja Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

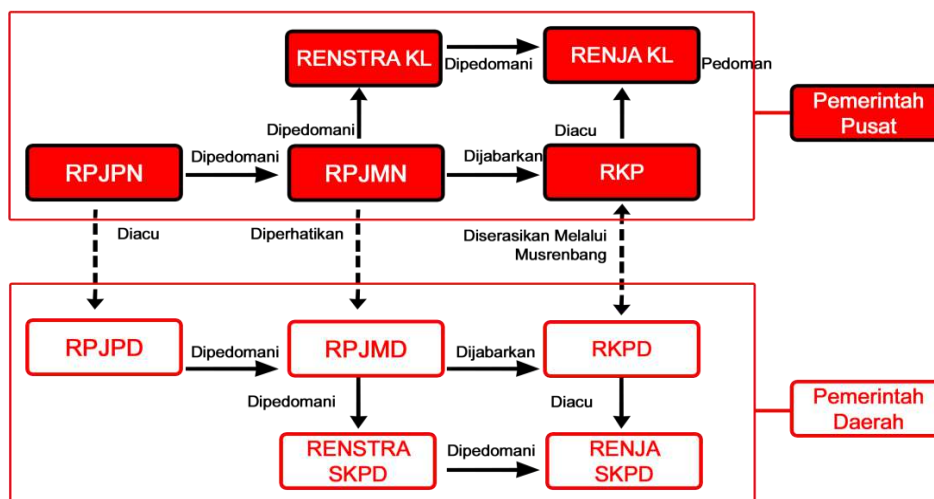
Rencana awal Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Proses politik selanjutnya adalah sebagai sinkronisasi dan pendampingan pada rancangan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir pada RPJMD. Pada rancangan akhir RPJMD dibahas antara pemerintah daerah dengan DPRD dijadikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Perda RPJMD

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



Kabupaten Sidoarjo dijadikan rujukan hukum sebagai penetapan Rancangan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo menjadi Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

Penyusunan rancangan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijelaskan melalui rancangan awal Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambar pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya. Isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tupoksi, serta hasil penelaahan pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Pada Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara capaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dokumen pada perencanaan pembangunan daerah. Untuk menjelaskan keterkaitan tersebut dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo menurut gambar tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Sidoarjo pada setiap tahunnya dimulai pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dalam konteksnya BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah membantu Bupati dalam melaksanakan



sebagian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.

Visi dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”** dengan peran BPKAD terletak pada misi pertama **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”** yang memiliki tujuan **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”** dengan sasaran pertama yaitu **“Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital”**.

Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo juga memiliki hubungan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dimana terletak pada sasaran strategis yang berhubungan langsung dengan tugas dan pokok yang dilakukan oleh kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan perubahan indikator dan target pada sub kegiatan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.



32. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah pembangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas program, kegiatan, sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yakni Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam gambaran pelayanan BPKAD terdiri dari beberapa sub bab yakni Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD

Merupakan bab yang berisi tentang isu permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam permasalahan dan isu-isu strategis BPKAD terdiri dari beberapa sub bab yakni Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentu Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan bab yang berisi tentang penjabaran tujuan, sasaran, indikator, dan target yang sudah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi BUD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo



Uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Badan serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Badan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas dan akuntabilitas pada Badan;
- e. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi:
 - 1) Penyusunan program kerja Badan;
 - 2) Pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Badan;
 - 3) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran;



- 4) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan;
 - 5) Penyusunan laporan kinerja Badan;
 - 6) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 - 7) Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - 8) Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 - 9) Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 - 10) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaporan kinerja Badan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari I (satu) sub bagian yaitu:

- I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Badan;
 - c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/website Badan;
 - f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
 - h. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis anggaran;



- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis anggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan analisa pengelolaan keuangan daerah meliputi :
 - 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis analisa pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis analisa pengelolaan keuangan daerah, meliputi :
 - a) Analisa dan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;
 - b) Analisa dan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - c) Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - d) Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - e) Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - f) Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
 - g) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
 - h) Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - i) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - j) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
 - 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis analisa pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan meliputi :
 - 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, meliputi :
 - a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum



- Anggaran Sementara (PKUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS);
- b) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang PAPBD;
 - c) Data pendapatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD serta perubahannya;
 - d) Nota keuangan RAPBD dan RPAPBD;
 - e) Petunjuk teknis penyusunan RKA;
 - f) Menyiapkan bahan publikasi APBD dan PAPBD;
 - g) Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi :
- 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan anggaran;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan anggaran, meliputi:
 - a) Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;
 - b) Pembinaan penyusunan anggaran;
 - c) Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup penganggaran;
 - d) Evaluasi penyusunan anggaran.
 - 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pembinaan anggaran;
 - 4) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis anggaran;
- g. Pelaporan kinerja bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.



3. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dan akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
- b. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;
- c. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan perbendaharaan meliputi:
 - 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis perbendaharaan;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan, meliputi:
 - a) Verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD;
 - b) Menyiapkan anggaran kas;
 - c) Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD);
 - d) Memeriksa kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan surat perintah pembayaran dana (SP2D);
 - e) Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f) Melaksanakan rekonsiliasi kas dengan Bank;
 - g) Memverifikasi pengajuan SKPP gaji;
 - h) Melaksanakan manajemen kas daerah;
 - i) Melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi dana transfer.
 - 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Akuntansi meliputi:
 - 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis akuntansi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan akuntansi, meliputi:
 - a) Menyiapkan bahan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - c) Menyiapkan bahan publikasi dan laporan keuangan;



- d) Menyiapkan bahan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- f) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah;
- g) Penatausahaan atas laporan keuangan perangkat daerah;
- h) Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat daerah;
- i) Pelaksanaan konsolidasi laporan laporan keuangan perangkat daerah;
- j) Koordinasi dan konsultasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
- k) Penatausahaan atas laporan bulanan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD;
- l) Penatausahaan atas laporan bulanan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD dari perangkat daerah; dan
- m) Pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntansi;
- 4) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- e. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan evaluasi dan pembinaan akuntansi meliputi:
 - 1) Menyusun rumusan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan akuntansi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan akuntansi, meliputi:
 - a) Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan dan akuntansi;
 - d) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;



- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan/pemotongan pajak pusat;
 - f) Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup penatausahaan dan akuntansi;
 - g) Penatausahaan investasi permanen dan non permanen.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembinaan akuntansi;
- 4) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Pelaporan kinerja bidang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;
- c. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan perencanaan dan pemanfaatan meliputi:
 - 1) Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah, meliputi:
 - a) Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - c) Menyiapkan bahan pertimbangan atas pengajuan usulan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d) Menyiapkan pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan;



- e) Pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola barang milik daerah;
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi:
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah meliputi:
 - a) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
 - b) Menyiapkan pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
 - c) Menyiapkan bahan pertimbangan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - d) Menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi laporan barang milik daerah;
 - e) Menyiapkan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - f) Pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten.
 - 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - 4) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- e. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Pengamanan dan Pemindahtanganan meliputi:
 - 1) Menyusun perumusan kebijakan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pengamanan dan pemindahtanganan:
 - a) Menyiapkan pelaksanaan pengamanan fisik, administratif dan hukum;
 - b) Menyiapkan pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan;
 - c) Menyiapkan pelaksanaan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah;



- d) Menyiapkan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;
- g. Pelaporan kinerja bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kekuatan Sumber Daya Manusia / SDM sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

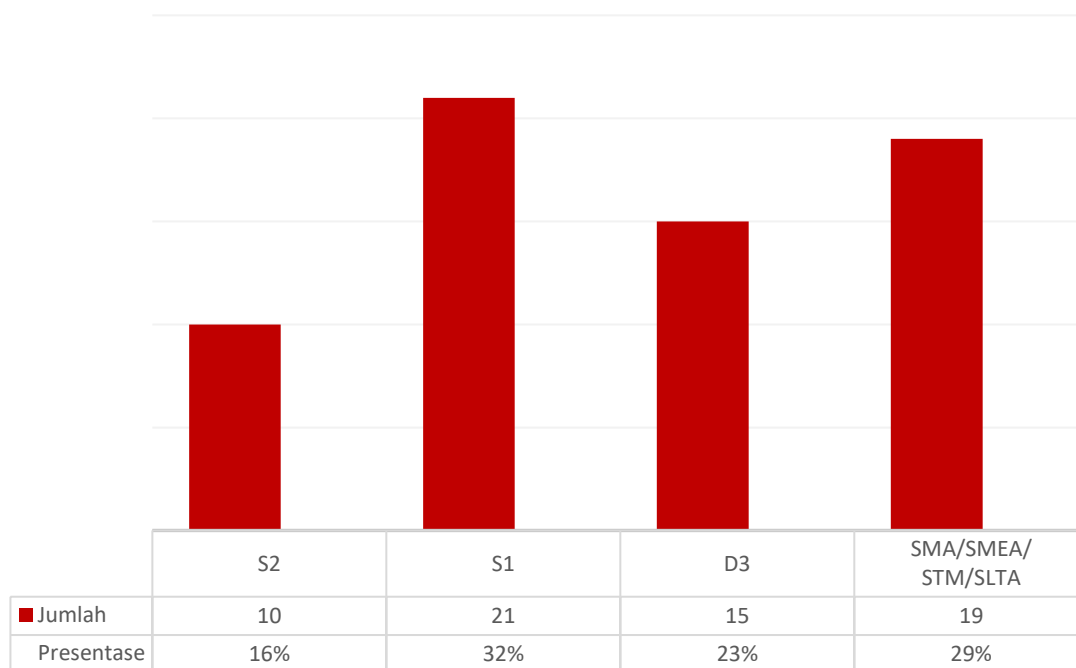
Tabel 2.1
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

ASN	JUMLAH	%
S2	10	16%
S1	21	32%
D3	15	23%
SMA/SMEA/STM/SLTA	19	29%
JUMLAH	65	100%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022



Berdasarkan tingkat pendidikan dapat diuraikan bahwa pada tingkat pendidikan S1 yang terbanyak, hal ini menandakan pada tingkat pendidikan yang dinilai tinggi diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kinerja yang optimal pada BPKAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Gambar 2.2
 Persentase Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai BPKAD berdasarkan usia dikempokkan menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Berdasarkan Usia

ASN	JUMLAH	%
20-30 Tahun	7	11%
31-40 Tahun	19	29%
41-50 Tahun	22	34%
51-60 Tahun	17	26%
JUMLAH	65	100%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

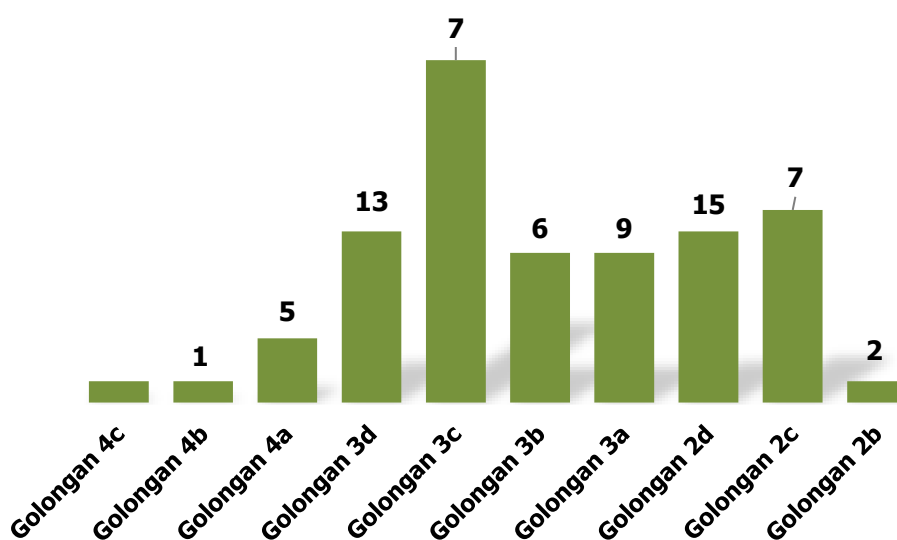


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui pada usia 20-30 tahun sebanyak 11%, usia 31-40 tahun sebanyak 29%, usia 41-50 tahun sebanyak 34%, dan usia diatas 50 tahun sebanyak 26%. Terdapat pula proyeksi jumlah pegawai yang akan pensiun dalam 5 tahun mendatang. Maka dari itu BPKAD harus mempersiapkan SDM baru guna mengisi kekosongan tersebut.

Tabel 2.3
 Berdasarkan Masa Purna untuk Lima Tahun Renstra

No	Nama	Tahun	Bulan	Tanggal	2022	Tahun Pensiun
1	DJULAICHAH	1965	Desember	28	57	2023
2	FAISAL YUSUF	1966	Desember	30	56	2024
3	AGUS CHAZMI	1967	Januari	2	55	2025
4	PITANING ASTUTIK	1967	Mei	19	55	2025
5	SUPRIHATIN	1968	Desember	30	54	2026
6	JAKA SUMA AJI, SE., MM	1969	Februari	01	53	2027
7	NURUL IZZA, S.Sos	1969	Oktober	05	53	2027
8	KHUSNUL GHANI	1969	Agustus	22	53	2027
9	INDAHYATI, S.Pd	1969	Januari	15	53	2027



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Gambar 2.3
 Berdasarkan Golongan

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



Terakhir, adalah analisis beban kerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis, total kebutuhan pegawai BPKAD sebanyak 91 orang, eksisting saat ini telah tersedia sebanyak 65 orang pegawai, yang artinya BPKAD masih terjadi defisit pegawai sebanyak 26 orang.

Tabel 2.4
Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai BPKAD

No	Nama Jabatan Sesuai Permenpan	Kebutuhan	Eksisting		Kualifikasi Pendidikan Minimal
			PNS	CPNS	
1	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1		
2	SEKRETARIS	1	1		
3	Analisis Perencanaan	1	1		
4	Bendahara	1	1		
5	Pengelola Keuangan	2	2		
6	Pengelola gaji	1	1		
7	Pengelola Bahan Perencanaan	1	2		
8	Pengadministrasian Umum	1	1		
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1		
10	Pengadministrasian Umum	2	1		SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
11	Pengelola Kepegawaian	1	1		
12	Pengelola sarana dan prasarana kantor	1	1		
13	Pengemudi	1	1		
14	Pramu Bakti	1	0		SLTA atau sederajat bidang yang dibutuhkan/ Administrasi Perkantoran/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
15	Petugas Keamanan	6	0		SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



No	Nama Jabatan Sesuai Permenpan	Kebutuhan	Eksisting		Kualifikasi Pendidikan Minimal
			PNS	CPNS	
					bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
16	Pramu Kebersihan	0	0		
17	Pengelola Teknologi Informasi	2	1	1	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Telekomunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
18	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0		SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang mesin/listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
19	Pranata Komputer Pelaksana	2	0		D-3 (Diploma-Tiga) Teknik Infomatika/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
20	Arsiparis Pelaksana	1	0		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
21	KEPALA BIDANG ANGGARAN	1	1		
22	Analisis Pendapatan Daerah	1	0		S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
23	Pengelola Pendapatan	2	2		
24	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	2	2		
25	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1		
26	Pengelola Data belanja dan Laporan Keuangan	4	3		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
27	Pengelola Kegiatan	1	0		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



No	Nama Jabatan Sesuai Permenpan	Kebutuhan	Eksisting		Kualifikasi Pendidikan Minimal
			PNS	CPNS	
					Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
28	Pengadministrasian Umum	1	0		SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
29	Pengevaluasi Pendapatan dan Belanja	1	0		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
30	Pengelola Data Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	3	2		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
31	Verifikator Anggaran	1	1		
32	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	1	1		
33	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	3	3		
34	Analisis Perbendaharaan	1	1		
35	Pengelola Data Perbendaharaan	5	6		
36	Pengadministrasi Umum	1	1		
37	Pengadministrasi Penerimaan	1	1		
38	Analisis Sistem akuntansi Instansi	1	0		S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



No	Nama Jabatan Sesuai Permenpan	Kebutuhan	Eksisting		Kualifikasi Pendidikan Minimal
			PNS	CPNS	
39	Pengelola Akuntansi	5	1	2	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
40	Analisis Bimbingan Akuntansi	1	0		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
41	Pengolah Data Bimbingan Akuntansi	2	2		
42	Pengadministrasian Umum	1	1		
43	Pengelola Kegiatan	1	0		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
44	KEPALA BIDANG ASET	1	1		
45	Analisis Hukum Ahli Muda	1	1		
46	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	1		
47	Pengola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	3		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
48	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1	1		
49	Pengelola Data	4	4		
50	Pengelola Kegiatan	1	1		
51	Pengadministrasian Umum	1	1		
52	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1		
53	Analisis Penilaian Aset	1	0		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



No	Nama Jabatan Sesuai Permenpan	Kebutuhan	Eksisting		Kualifikasi Pendidikan Minimal
			PNS	CPNS	
					Sosial/Komunikasi/Manajemen/ Administrasi Negara/Manajemen Aset
54	Pengelola Data	4	2		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/kegiatan.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nama Barang	Total	Keterangan
AC	39	
Akses Pintu Kontrol	2	
Alat Perekam Suara	1	
Alat Ukur Meteran Gelinding	1	
Almari	44	
Braket Standing	1	
Brankas	15	
CCTV	1	
CPU	8	7 rusak berat
Dispenser	6	
Distometer	2	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Nama Barang	Total	Keterangan
D-Link Wifi Router DIR	1	
DVDRW External LG	1	
Exhouse Fan	5	
Filling Cabinet	19	
Furniture ruang rapat	3	
Generator Set	1	
Handy cam	2	
Harddisk Eksternal	14	
Harddisk Server	5	
IBM System	3	
Instalasi Koneksi Internet	1	
Jam Dinding	4	
Jaringan Komp.	2	
Jaringan LAN SIPKD & SIKD	1	
Jaringan Nircable SIPKD	1	
Kamera	9	
Karpet	2	
Komputer mainframe/server	3	
Komputer PC	83	6 rusak berat 1 rusak ringan
Korden	8	
Kulkas	4	
Kursi Eselon	13	3 rusak berat
Kursi Kerja	80	2 rusak berat
Kursi Rapat	150	4 rusak berat
Kursi Ruang tunggu	21	
Kursi Staf	10	3 rusak berat
KVM Rackmount merk Aten CL5708	1	
Lampu Sorot	4	
Laptop	44	1 rusak berat
LCD Monitor	6	5 rusak berat
Meja	82	
Meja Lipat	4	
Meja rapat	9	
Memori Server Kapasitas 8 GB	6	
Mesin Absensi	3	
Mesin Fax	3	
Mesin Fotocopy	7	2 rusak berat

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



Nama Barang	Total	Keterangan
Mesin Ketik	2	
Mesin Penghancur Kertas	8	1 rusak berat
Mesin Potong Rumput General 431	2	1 rusak ringan
Microphone	70	26 rusak berat
Mixer	2	
Mobil	35	26 unit dipinjam pakai oleh instansi vertikal
Papan instansi	356	Dipasang pada aset-aset milik Pemkab Sidoarjo
Papan Interaktif Aiboard (Paket : Papan, Laptop, Printer, LCD Proyektor)	1	
Papan nama ruangan	6	1 rusak berat
Papan Tulis Elektronik	1	
Pesawat telepon	11	
Podium	1	
Pompa Air	1	
Portable Hepa Filter	9	
Printer	79	2 rusak berat
Profil Tank Plastik Vol. 5,300 ltr	1	
Profil Tank Stainless	1	
Proyektor/LCD	8	1 rusak berat
Rak Arsip	52	1 rusak berat
Rambu Lalu Lintas Larangan Parkir	6	
Scanner	7	
Sepeda Motor	80	
Server	3	
Server Cabinet Rack System	1	
Sofa	5	
Sound System	1	
Speaker aktif (Stand speaker + kabel)	1	
Staples Besar	1	
Sticker Kaca	1	
Swict Manage Layer Merk Allied	1	
Tablet	7	1 rusak berat
Tabung Pemadam Api	8	
Tangga Aluminium	1	
Televisi	14	1 rusak berat
Tempat Sampah	1	1 rusak berat



Nama Barang	Total	Keterangan
UPS	15	2 rusak berat
Vacum Cleaner	1	
Wallpaper	4	
Water Heater	1	
Grand Total	1540	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BPKAD sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kinerja pada perencanaan periode sebelumnya diukur dengan indikator Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD, Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas, Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal, Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah, Rasio PAD terhadap pendapatan daerah.



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.6
Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran BPKAD	Target Renstra PD pada tahun						Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	93,75%	86,03%	85,42%	81,25%	100%	N/A	93,75%	86%	85%	81%	100%
3	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	N/A	38,67%	36,21%	27,93%	33%	39,72%	N/A	41,31%	39,12%	38,14%	40,92%	41,26%	N/A	106,83 %	108%	137%	124%	103,88 %
4	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	N/A	99,73%	99,73%	99,74%	99,75%	99,752 %	N/A	100%	99,812%	98,703%	99,483%	99,50%	N/A	100,27 %	100,08 %	99%	99,73%	99,75%
5	Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	N/A	98%	100%	100%	100%	100%	N/A	96,76%	98%	100%	100%	100%	N/A	98,73%	98%	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Periode 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD

Pada Indikator Sasaran Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD bahwa realisasi telah mencapai target 100% dari Tahun 2017 hingga 2021 dapat disimpulkan dalam indikator Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD kinerja pada BPKAD telah optimal.

2. Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan

Pada Indikator Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan bahwa pada Tahun 2017-2021 target 100% tetapi realisasi pada Tahun 2017 yaitu 93,75%, Tahun 2018 yaitu 86,03%, Tahun 2019 yaitu 85,42%, Tahun 2020 yaitu 81,25%, Tahun 2021 yaitu 100%. Dapat disimpulkan pada Tahun 2017 sampai Tahun 2020 realisasi pada indikator Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan belum optimal, sedangkan pada Tahun 2021 kinerja pada BPKAD optimal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Penerapan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Prestasi Kerja berdasarkan realisasi penyerapan anggaran;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran setiap triwulan;
- c. Penerbitan surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan realisasi penyerapan belanja setiap triwulan;
- d. Mekanisme penyerapan belanja <Rp. 50.000.000,00 dengan menggunakan GU.

3. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

Pada Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah pada realisasi Tahun 2017 hingga 2021 telah melampaui target yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah telah optimal.

4. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal

Pada Indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal pada Tahun 2017 dengan target 99,73% dan realisasi 100% bahwa antara target dan realisasi pada kinerja telah optimal yaitu capaian kinerja 100,27%. Pada Tahun 2018 target 99,73%

***RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021–2026***

dan realisasi 98,703% bahwa antara target dan realisasi pada kinerja telah optimal yaitu capaian kinerja 100,08%. Namun pada Tahun 2019 target 99,74% dengan realisasi 98,703% dan capaian 99% yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2020 target 99,75% dengan realisasi 99,483% dan capaian kinerja 99,73%. Hal ini mengalami kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2021 target 99,752% dengan realisasi 99,50% dan capaian kinerja 99,75%.

5. Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah

Pada Indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal Tahun 2017 dengan target 98% realisasi 96,76%, Tahun 2018 dengan target 100% dengan realisasi 98% yaitu pada Tahun 2017 dan 2018 kurang optimalnya kinerja pada indikator Persentase PD yang tertib tata kelola barang milik daerah. Tetapi disusul pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan target 100% dan realisasi 100% telah mencapai target yang telah ditentukan.



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran BPKAD	Target Renstra PD pada tahun (Juta Rupiah)						Realisasi Capaian pada tahun						Rasio Capaian pada tahun-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)
1	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD	N/A	3.259	2.819	4.844	3.056		N/A	2.580	2.519	4.348	2.917		N/A	79%	89%	89,75%	95,44%		13.979	12.365
2	Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	N/A	2.071	1.408	1.691	1.074	750.421	N/A	1.624	1.241	1.546	9.84.3	728.181	N/A	78%	88%	91,42%	91,59%	97,04%	6.246	5.396
3	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah																				
4	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	N/A	2.301	1.264	2.691	1.633	3.066	N/A	1.227	1.199	1.601	1.521	2.350	N/A	53%	95%	59,49%	93,16%	76,67%	7.890	5.549
5	Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah																				

Sumber: LAKIP Periode 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021–2026**

**2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Perumusan tantangan dan peluang berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Renstra Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sasaran renstra kementerian dan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang sinergi dengan capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BPKAD	Sasaran pada Renstra Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan
1	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan APBD	100%	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif.	Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
2	Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	86,44%			
3	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,84%			
4	Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	99,18%			

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021–2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BPKAD	Sasaran pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan
5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	118,96%			

Salah satu sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri yang sinergi dengan BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah **Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif**, dengan indikator sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui 6 (enam) dimensi yakni:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi ini mengukur kesesuaian program dan kegiatan Perangkat daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yakni RPKD, KUA-PPAS dan APBD. Untuk mengukur dimensi ini perlu peran serta perangkat daerah pelaksana *stakeholder* perencanaan dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

2. Pengalokasi anggaran belanja dalam APBD

Dimensi ini mengukur persentase alokasi belanja untuk urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung dalam pendapatan transfer dan alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Alokasi penganggaran Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi alokasi minimal yang diatur yakni 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi transparansi ini mencakup indikator ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah diantaranya RPKD, KUA, ringkasan PPAS, ringkasan RKA, ringkasan DPA, Perda APBD, dll. BPKAD telah menyusun laporan keuangan daerah dengan tepat waktu.

4. Penyerapan anggaran

Dimensi ini mengukur persentase realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran masing-masing pos belanja.

5. Kondisi keuangan daerah

Dimensi kondisi keuangan daerah diukur dari 6 (enam) indikator yakni kemandirian keuangan, stabilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Dimensi ini diukur dengan memberikan skor atas jumlah perolehan opini WTP, jika pemerintah daerah memperoleh WTP secara 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut maka skor 1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sidoarjo dalam 3 (tiga) tahun terakhir memperoleh WTP.

Berdasarkan telaah sasaran dan indikator pengelolaan keuangan daerah diatas, tantangan dan peluang terhadap pelayanan BPKAD antara lain:

a) Tantangan:

1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat dan berdampak pada kebijakan Daerah.
2. Belum secara keseluruhan integrasi sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset di internal BPKAD.
3. Adanya potensi Belanja Tidak Terduga tidak terserap atau serapannya kecil, karena penyerapan Belanja Tidak Terduga disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

b) Peluang:

1. Adanya payung hukum yang jelas bagi BPKAD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban.
2. Adanya komitmen internal yang kuat untuk mengembangkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta alat untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengalokasian anggaran untuk urusan wajib dasar telah sesuai dengan regulasi yakni 20% dari APBD untuk pendidikan dan 10% dari APBD untuk kesehatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjukkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I	Menjaga dan mengoptimalkan kinerja BPKAD, dalam mengelola keuangan dan aset daerah	1. Tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing – masing PD belum optimal; 2. Masih banyak aset tanah milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat.	1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN; 4. Setiap tahun barang milik daerah Pemkab Sidoarjo akan terus bertambah.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri,**



Sejahtera, dan Madani”. Sehubungan dengan hal itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan *People Centered Development* atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya



pelestarian lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (lima) misi tersebut :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting *good governance*. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sektor perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan



dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.



Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada nilai (*value*) tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui Misi I (satu) diatas yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**. Untuk mewujudkan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Sidoarjo ikut serta berkontribusi kepada pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut Program BPKAD yang mendukung program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
1. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT, meliputi program: a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera, meliputi program: a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	1. Belum adanya mapping per tahun jumlah penerima bantuan dana operasional; 2. Belum adanya petunjuk teknis sebagai dasar pemberian dana operasional.	1. Menjalin koordinasi dengan Bappeda dan DPMD terkait teknis pelaksanaan program prioritas.

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KEUANGAN DAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya :

3.3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**



Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang sinergis dengan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah :

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
I	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif.	Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.	1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal; 2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD; 3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset.	1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.	1. BPKAD terus mengajukan barang milik daerah (tanah) yang akan disertifikasi; 2. Mengintensifkan sosialisasi, IHT (<i>In-House Training</i>) bekerja sama dengan BKD; 3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada PD.

3.3.2 Telaah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.



Tabel 3.4
Telaah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal; 2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD; 3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset.	1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.	1. BPKAD terus mengajukan barang milik daerah (tanah) yang akan disertifikasi; 2. Mengintensifkan sosialisasi, IHT (<i>In-House Training</i>) bekerja sama dengan BKD; 3. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada PD.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUP HIDUP STRATEGIS

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan BPKAD. Program Kabupaten Sidoarjo yang diturunkan menjadi Program PD telah dianalisis dalam dokumen KLHS pada RPJMD. Namun tidak ada implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan BPKAD.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dan review terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui bahwa isu-isu strategis :



1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;
2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;
3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;
4. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis;
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan bobot terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, berikut merupakan bobot kriteria penilaian isu-isu strategis;

Tabel 3.5
Bobot Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	20%
2	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran	35%
3	Berpotensi jangka pendek maupun jangka menengah untuk dapat diselesaikan	35%
4	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10%
Total		100%

- b. Memberikan skor kepada masing-masing isu strategis, berikut merupakan skor isu strategis :
 - Skor 4 : sangat prioritas
 - Skor 3 : prioritas
 - Skor 2 : cukup prioritas
 - Skor 1 : kurang prioritas



- c. Mengalikan bobot dengan skor untuk mengetahui peringkat isu tertinggi yang menjadi isu prioritas perangkat daerah.

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis telah ditentukan hasil penilaian isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Total Skor				Total Skor
		1 (20%)	2 (35%)	3 (35%)	4 (10%)	5 (100%)
1	Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;	0,4	0,6	0,4	0,4	1,8
2	Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;	0,4	0,6	0,4	0,4	1,8
3	Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset.	0,8	0,6	0,6	0,4	2,4
4	Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN	0,4	0,6	0,4	0,4	1,8

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa isu strategis prioritas BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset dan isu prioritas lainnya adalah tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal; kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD; dan masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.

Agar isu strategis ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan maka perlu ada inovasi yakni sistem yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat menunjang BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran kedepan; berupaya terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi bersama

***PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026***



dengan Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 (lima) Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial antar Warga.

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi I (satu) yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan BPKAD Kabupaten Sidoarjo,



“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel;**
- 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah.**



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini atas laporan BPK merupakan opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DO: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD (Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai SAP/Jumlah PD)x100%	Laporan Keuangan PD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
													b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	%	99,752%	99,85%	99,96%	99,96%	99,96%	99,97%	DO: Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumen tersebut berupa: 1. Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN) 2. Kendaraan Bermotor berupa		



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) 3. Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima (Jumlah aset tetap terdokumentasi legal/jumlah aset tetap)x100%		
												Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP	Predikat	A(82,3)	A(83,46)	A(84)	A(84)	A(85)	A(85)	DO: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan SAKIP adalah terlaksananya penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

N o	Tujuan	Indika tor Tujua n	Target capaian kinerja						Formul asi Perhitu ngan / Penjelas an	Sumber Data	Penang gung Jawab Data	Sasaran	Indika tor Sasara n	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumb er Data	Penanggu ng Jawab Data										
			20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26							202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
																					untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. dengan komponen penilaian sbb: <table><tr><td>Kompo nen</td><td>Bob ot</td></tr><tr><td>Perenca naan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Penguk uran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelapor an Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi AKunta bilitas Kinerja</td><td>25</td></tr></table>	Kompo nen	Bob ot	Perenca naan Kinerja	30	Penguk uran Kinerja	30	Pelapor an Kinerja	15	Evaluasi AKunta bilitas Kinerja	25		
Kompo nen	Bob ot																																
Perenca naan Kinerja	30																																
Penguk uran Kinerja	30																																
Pelapor an Kinerja	15																																
Evaluasi AKunta bilitas Kinerja	25																																
													b. Nila i IPP	Predikat	3,99 (B)	A- (4,03)	A- (4,04)	A- (4,07)	A- (4,1)	A- (4,15)	DO:indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Hasil penilaian IPP	Sekretariat										



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data																					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																					
																					Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi Sesuai dengan LHE IPP dengan kriteria penilaian: <table><tr><td>Ran ge Nila i</td><td>K a t e g o r i</td><td>Mak na</td></tr><tr><td>0- 1,0 0</td><td>F</td><td>Gaga l</td></tr><tr><td>1,01 - 1,50</td><td>E</td><td>Sang at Buru k</td></tr><tr><td>1,51 - 2,00</td><td>D</td><td>Buru k</td></tr><tr><td>2,01 - 2,50</td><td>C -</td><td>Cuku p (den gan catat an)</td></tr><tr><td>2,51 - 3,00</td><td>C</td><td>Cuku p</td></tr><tr><td>3,01 -</td><td>B -</td><td>Baik (den</td></tr></table>	Ran ge Nila i	K a t e g o r i	Mak na	0- 1,0 0	F	Gaga l	1,01 - 1,50	E	Sang at Buru k	1,51 - 2,00	D	Buru k	2,01 - 2,50	C -	Cuku p (den gan catat an)	2,51 - 3,00	C	Cuku p	3,01 -	B -	Baik (den		
Ran ge Nila i	K a t e g o r i	Mak na																																										
0- 1,0 0	F	Gaga l																																										
1,01 - 1,50	E	Sang at Buru k																																										
1,51 - 2,00	D	Buru k																																										
2,01 - 2,50	C -	Cuku p (den gan catat an)																																										
2,51 - 3,00	C	Cuku p																																										
3,01 -	B -	Baik (den																																										



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24
																					3,50		gan catan)		
																					3,51 - 4,00	B	Baik		
																					4,01 - 4,50	A	Sangat Baik		
																					4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima		
													c. Nilai IKM /SKM	Predikat	Baik (84,65)	Sangat Baik (96,06)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	DO:SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Berdasarkan hasil penilaian SKM dengan kriteria			Hasil penilaian SKM	Sekretariat



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					penilaian:		
																					Nilai Interval	Kategori	
																					1,00-2,5996	Tidak Baik	
																					2,60-3,064	Kurang Baik	
																					2,0644-3,532	Baik	
																					3,5324-4,00	Sangat Baik	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha. Dengan tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha serta memiliki fungsi.

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan;
5. Pelaksanaan fungsi BUD;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui telaah dan identifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 5.1
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal	
1. Kekuatan	
1)	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2)	Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang;
3)	Adanya komunikasi yang baik dan lancar dalam bentuk komunikasi satu arah maupun dua arah antara sesama pegawai maupun dengan pimpinan.
2. Kelemahan	
1)	Masih terdapat pengelola keuangan yang belum tanggap dan anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
2)	Terbatasnya pengamanan barang milik daerah;
3)	Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pengawasan keuangan dan aset daerah;
4)	Belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset daerah.
Faktor Lingkungan Eksternal	
1) Peluang	
1)	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan keuangan daerah terutama pada APBD.
2)	Tersedianya regulasi pusat yang menjadi pedoman daerah dalam mengelola keuangan daerah.
2. Ancaman	
1)	Kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, memerlukan perubahan pengelolaan keuangan daerah yang cepat;
2)	Bergantungnya BPKAD terhadap lembaga lain dalam menerbitkan sertifikat aset tanah;
3)	Kemampuan SDM yang tidak merata di PD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Berdasarkan *positioning* internal dan eksternal BPKAD, strategi yang dilaksanakan BPKAD antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah;
2. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan papan nama aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan percepatan proses pensertifikatan aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

5.2 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aset daerah;
3. Pemasangan papan nama aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan berupaya terus menjalin komunikasi serta berkoordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 5.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.			
MISI I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah;	1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
		2. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;	2. Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aset daerah;
		3. Pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan papan milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan percepatan proses pensertifikatan aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	3. Pemasangan papan nama aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan berupaya terus menjalin komunikasi serta berkoordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah milik



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

			Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Perbaikan manajemen kualitas jasa	1. Meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan customer (masyarakat pengguna)
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	2. Penguatan komitmen, pembinaan SAKIP, penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Tabel 5.3
 Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD)

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; a. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; e. Pengadaan Barang Milik Daerah
				b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai SAKIP	
				b. Nilai IPP	
				c. Nilai IKM/SKM	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi :

- I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 3) Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran.
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
 - 2) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Konsolidasi laporan keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;



- 2) Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban.
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
 - 2) Pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - 3) Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota;
 - 4) Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 3) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Fasilitas kunjungan tamu;
 - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD;
 - 8) Penatausahaan arsip dinamis pada PD.



- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan mebel;
 - 2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 4) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Selain itu, BPKAD turut berkontribusi kepada pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Program prioritas ini didukung dengan program yang dilaksanakan oleh PD, berikut Program BPKAD yang mendukung program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- 1. Program Prioritas: Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT, dengan program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Program Prioritas: Tingkat ADD Untuk Desa Sejahtera, dengan Program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah



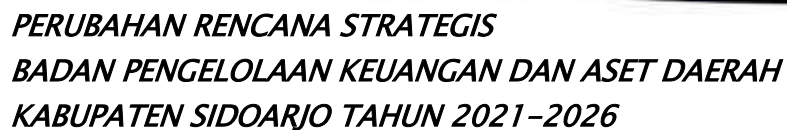
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

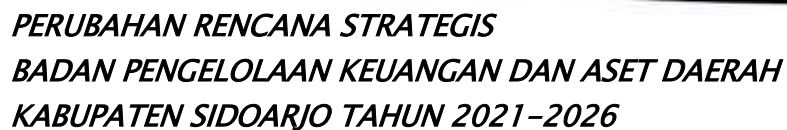
Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
(sebelum perubahan adanya penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. % Laporan keuangan OPD yang sesuai SAP b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal a. Nilai SAKIP b. Nilai IPP c. Nilai IKM/SKM

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t	Rp		
1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS b. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPB D c.ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbun		a.Tepat waktu b.Tepat waktu c.Tepat waktu d.100% e.100%	a.Tepat waktu b.Tepa t waktu c.Tepat waktu d.100% e.100%	645.099.47 5.742	a.Tepat waktu b.Tepat waktu c.Tepat waktu d.100% e.100%	620.138.1 25.812	a.Tep at waktu b.Tep at waktu c.Tep at waktu d.100 % e.100 %	715.924.1 95.198	a.Tepat waktu b.Tepat waktu c.Tepat waktu d.100% e.100%	777.209.6 14.688	a.Tep at waktu b.Tep at waktu c.Tep at waktu d.100 % e.100 %		854.874 .576.007	a.Tepat waktu b.Tepat waktu c.Tepat waktu d.100% e.100%		940.302.0 33.085	a.Tepa t waktu b.Tepa t waktu c.Tepa t waktu d.100 % e.100 %	940.302.033 .085	Bidang Anggaran, Bidang Perbenda haraan dan Akuntansi	BPKAD

VI-5

VI-6



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermedia te output) / subkegiata n (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t
		serta Kebijakan Bidang Anggaran	anggaran yang disusun/diteta pkan	Kebijakan Bidang Anggaran																	Pembinaa n APBD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu		70%	100%	245.695.47 8	100%	450.492.3 80	100%	495.542.3 00	100%	545.096.5 00	100%	599.606. 000	100%		659.566.8 00	100%	659.566.800	Bidang Perbenda haraan dan Akuntansi		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausah aan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Prosentase SPM yang diterbitkan SP2D	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausah aan dan Pertanggun gjawaban Sub Kegiatan	95%	100%	245.695.47 8	100%	450.493.2 77	100%	495.542.3 00	100%	545.096.5 00	100%	1 dokumen	599.606. 000	100%	1 dokumen	659.566.8 00	100%	659.566.800		Sub Bidang Perbenda haraan
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	100%	1.006.220. 000	100%	1.039.352 .600	100%	976.975.0 00	100%	1.019.672 .500	100%		1.065.63 9.750	100%		1.112.203 .000	100%	1.112.203.0 00		Bidang Perbenda haraan dan Akuntansi



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t			Rp
			Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	20 laporan	20 laporan	731.095.000	20 laporan	742.102.600	20 laporan	650.000.000	20 laporan	660.000.000	20 laporan	2 laporan	670.000.000	20 laporan	2 laporan	680.000.000	20 laporan	680.000.000	Sub Bidang Akuntansi	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan LO dan Beban	1.Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi yang dilaksanakan 2.Bimtek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.12 kali 2.0 kali	1.12 kali 2.1 kali	275.125.000	1.12 kali 2.1 kali	297.250.000	1.12 kali 2.1 kali	326.975.000	1.12 kali 2.1 kali	359.672.500	1.12 kali 2.1 kali	4 Dokumen	395.639.750	1.12 kali 2.1 kali	4 Dokumen	432.203.000	1.12 kali 2.1 kali	432.203.000	Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi	
			Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer		100%	100%	642.347.915.196	100%	617.246.072.002	100%	712.689.199.202	100%	773.706.119.122	100%		851.076.731.035	100%		936.184.404.138	100%	936.184.404.138	Bidang Anggaran	
			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase realisasi penyaluran subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan	-	100%	2.520.000.000	100%	2.520.000.000	100%	2.520.000.000	100%	2.520.000.000	100%	4 Laporan	2.520.000.000	100%	4 Laporan	2.520.000.000	100%	2.520.000.000	Sub Bidang Analisa Pengelolan	



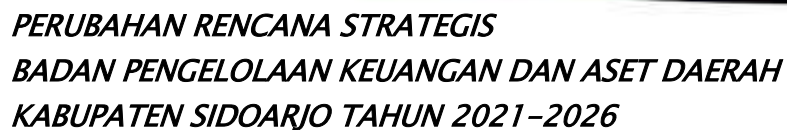
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

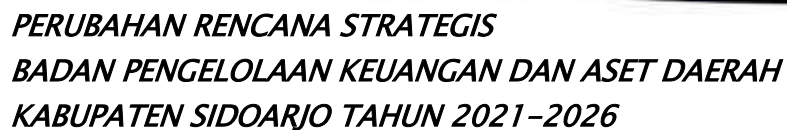
Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)-KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t	Rp				
				Alokasi Subsidi																	Keuangan Daerah				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	100%	38.910.000.000	100%	50.026.800.000	100%	89.000.000.000	100%	87.900.000.000	100%	4 Laporan	96.942.000.000	100%	4 Laporan	100.000.000.000	100%	100.000.000.000		Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/K ota	100%	100%	102.727.621.096	100%	103.631.292.902	100%	113.994.422.192	100%	125.393.864.411	100%	4 Laporan	137.933.250.853	100%	4 Laporan	158.614.775.940	100%	158.614.775.940		Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase realisasi Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	498.190.294.100	100%	451.067.979.100	100%	507.174.777.010	100%	557.892.254.711	100%	4 Laporan	613.681.480.182	100%	4 Laporan	675.049.628.200	100%	675.049.628.200		Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t	Rp		
2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1. Persentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat; 2. Prosentase pemindahtangan BMD yang diproses melalui lelang umum; 3. Prosentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD; 4.Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses		a. 18,22% b. 100% c. 100% d. 100%	a. 32,81% b. 100% c. 100% d. 100%	2.704.873.800	a. 49,45% b. 100% c. 100% d. 100%	3.985.980.830	a. 66,13% b. 100% c. 100% d. 100%	4.011.540.200	a. 82,81% b. 100% c. 100% d. 100%	3.383.540.200	a. 99,49% b. 100% c. 100% d. 100%		3.388.540.200	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		3.393.540.200	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	3.393.540.200	Bidang Aset	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN 2. Persentase permohonan pemindahtangan BMD yang	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	2.704.873.800	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.985.980.830	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	4.011.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.383.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%		3.388.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%		3.393.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.393.540.200	Bidang Aset		

VI-11

VI-12



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermedia te output) / subkegiata n (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
							Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t	Rp				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bula n)	12 bulan	12 bulan	9.565.979 .122	12 Bulan	9.513.82 4.490	12 Bulan	10.465.2 06.939	12 Bulan	11.511.7 27.633	12 Bulan		12.662. 900.39 6	12 Bulan		13.929.1 90.436	12 Bulan	13.929.190. 436	Subbag Umum dan Kepegaw aian			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan /bimtek/sosiali sasi/workshop		0	0	0	5%	0	5%	200.000. 000	5%	220.000. 000	5%		242.00 0.000	5%		266.200. 000	5%	266.200.00 0	Sekretari at			
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0	0	68 orang	200.000. 000	68 orang	220.000. 000	68 orang		242.00 0.000	68 orang		266.200. 000	68 orang	292.820.00 0	Subbag Umum dan Kepegaw aian				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariata n		100%	80%	1.285.560 .406	80%	2.328.96 0.692	80%	2.561.85 6.761	80%	2.818.04 2.437	80%		3.099.8 46.681	80%		3.409.83 1.349	80%	3.409.831.3 49	Sekretari at			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan	Jumlah komponen listrik/peneran gan yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi	14 Jenis	20 Jenis	24.286.05 0	20 Jenis	24.027.7 38	20 Jenis	26.430.5 12	20 Jenis	29.073.5 63	20 Jenis		31.980. 919	20 Jenis		35.179.0 11	20 Jenis	35.179.011	Subbag Umum dan Kepegaw aian			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermedia te output) / subkegiata n (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp			Targe t	Rp
			Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	40 jenis	157.434.978	40 jenis	242.253.438	40 jenis	266.478.782	40 jenis	293.126.660	40 jenis		322.439.326	40 jenis		354.683.259	40 jenis	354.683.259	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 bulan	256.600.000	12 Bulan	256.600.000	12 Bulan	282.260.000	12 Bulan	310.486.000	12 Bulan		341.534.600	12 Bulan		375.688.060	12 Bulan	375.688.060	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29 Jenis	25 jenis	27.932.239	25 Jenis	24.348.676	25 Jenis	26.783.544	25 Jenis	29.461.898	25 Jenis		32.408.088	25 Jenis		35.648.897	25 Jenis	35.648.897	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	62 Buah	792 Buah	2.400.000	792 Buah	4.972.000	792 Buah	5.469.200	792 Buah	6.016.120	792 Buah		6.617.732	792 Buah		7.279.505	792 Buah	7.279.505	Subbag Umum dan Kepegaw aian	



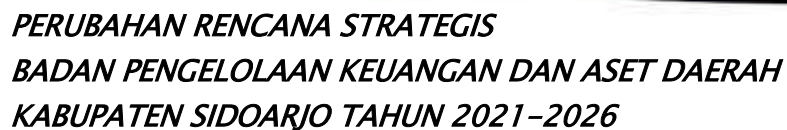
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)-KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t			Rp
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan	10 Kotak	1 Tahun	10.085.000	429 Kotak	10.085.000	429 Kotak	11.093.500	429 Kotak	12.202.850	429 Kotak		13.423.135	429 Kotak		14.765.449	429 Kotak	14.765.449	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a.12 Bulan b.12 Bulan	a.12 Bulan b.12 Bulan	806.822.139	a.12 Bulan b.12 Bulan	1.616.673.840	a.12 Bulan b.12 Bulan	1.778.341.224	a.12 Bulan b.12 Bulan	1.956.175.346	a.12 Bulan b.12 Bulan		2.151.792.881	a.12 Bulan b.12 Bulan		2.366.972.169	a.12 Bulan b.12 Bulan	2.366.972.169	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penatausahaan arsip dinamis pada PD	Jumlah arsip yang dikelola	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	150.000.000	1000 arsip	165.000.000	1000 arsip	181.500.000	1000 arsip		199.650.000	1000 arsip		219.615.000	1000 arsip	219.615.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan		87 Unit	70 Unit	1.453.478.325	34 unit	170.840.100	35 unit	187.924.110	35 unit	206.716.521	35 unit		227.388.173	35 unit		250.126.990	35 unit	250.126.990	Sekretariat	
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleurnya yang diadakan		0	30 Unit	117.942.325	1 Unit	3.246.100	2 Unit	3.570.710	2 Unit	3.927.781	2 Unit		4.320.559	2 Unit		4.752.615	2 Unit	4.752.615	Subbag Umum dan	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)- KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Targe t	Rp		
																						Kepegaw aian	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0	0	0	1 gedung	112.000. 000	1 gedu ng	123.200. 000	1 gedung	135.520. 000	1 gedu ng		149.07 2.000	1 gedung		163.979. 200	1 gedun g	163.979.20 0	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain		80 Unit	40 Unit	586.600.6 50	32 unit	55.594.0 00	-	0	-	0	-		0	-		0	-	0	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a.Jumlah mobil angkutan barang yang diadakan b.Jumlah mobil jabatan yang diadakan		1 Unit	a.1 unit b.1 unit	772.468.0 00	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan		-	-	-	-	-	32 unit	61.153.4 00	32 unit	67.268.7 40	32 unit		73.995. 614	32 unit		81.395.1 75	32 unit	81.395.175	Subbag Umum dan Kepegaw aian	

VI-17



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)-KEPMEN 900 Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Target sesuai KEPMEN 900	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a.9 Unit b.9 Unit	a.9 Unit b.9 Unit	47.500.000	a.9 Unit b.9 Unit	105.000.000	a.9 Unit b.9 Unit	115.500.000	a.9 Unit b.9 Unit	127.050.000	a.9 Unit b.9 Unit		139.755.000	a.9 Unit b.9 Unit		153.730.500	a.9 Unit b.9 Unit	153.730.500	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	180.000.000	1 Gedung	150.000.000	1 Gedung	165.000.000	1 Gedung	181.500.000	1 Gedung		199.650.000	1 Gedung		219.615.000	1 Gedung	219.615.000	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	6 Jenis	6 Jenis	0	6 Jenis	190.000.000	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	0	6 Jenis	209.000.000	6 Jenis	229.900.000	6 Jenis		252.890.000	6 Jenis		278.179.000	6 Jenis	278.179.000	Subbag Umum dan Kepegawaian		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 6.21
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
(penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. % Laporan keuangan OPD yang sesuai SAP b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal a. Nilai SAKIP b. Nilai IPP c. Nilai IKM/SKM

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS	a.Tepat waktu			a.Tepat waktu			a.Tepat waktu			a.Tepat waktu			a.Tepat waktu			Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	BPKAD
	/Perubahan KUA-PPAS	b.Tepat waktu	750.421.604.438	b.Tepat waktu	716.683.909.446	b.Tepat waktu	672.602.755.017	b.Tepat waktu	777.209.614.688	b.Tepat waktu	854.874.576.007	b.Tepat waktu	940.302.033.085	b.Tepat waktu	4.712.094.492.681			
		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu		c.Tepat waktu				
		d.100%		d.100%		d.100%		d.100%		d.100%		d.100%		d.100%				
		e.100%		e.100%		e.100%		e.100%		e.100%		e.100%		e.100%				
	b. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD																	
	c.ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD																	
	d.Prosentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan																	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			SAP e.Persentase realisasi penyaluran belanja transfer																	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1. Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun 2. Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	1.357.541.020	a. 100% b. 100%	1.284.282.390	a. 100% b. 100%	1.336.195.469	a. 100% b. 100%	1.938.726.566	a. 100% b. 100%	2.132.599.222	a. 100% b. 100%	2.345.859.144	a. 100% b. 100%	10.395.203.811	Bidang Anggaran	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	a. Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPAS yang tersusun b. Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang tersusun c. Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perda APBD yang tersusun d. Jumlah Dokumen Raperbup APBD dan Perbup APBD yang tersusun Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen	912.451.600	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen	1.021.092.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 7.356.396.462	Bidang Anggaran	
				-	-	-	-	-	6 Dokumen	1.167.580.469	6 Dokumen	1.285.580.666	6 Dokumen	1.414.138.732	6 Dokumen	1.555.552.605	6 Dokumen			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	a. Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPAS yang tersusun b. Jumlah Dokumen Perubahan KUA-	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen	177.055.670	a. 2 dokumen b. 2 dokumen c. 2 dokumen	218.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Anggaran	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penjabaran Perubahan APBD	PPAS yang tersusun c. Jumlah Dokumen Raperda PAPBD dan Perda PAPBD yang tersusun d. Jumlah Dokumen Raperbup PAPBD dan Perbup PAPBD yang tersusun		d. 2 dokumen		d. 2 dokume													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	-	6 Dokumen	139.315.000	6 Dokumen	291.549.500	6 Dokumen	320.704.450	6 Dokumen	352.774.895	6 Dokumen	352.774.895			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi dan kebijakan bidang anggaran yang disusun/ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	268.033.750	1 dokumen	44.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499.739.515	Bidang Anggaran	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	-	1 dokumen	29.300.000	1 dokumen	361.596.400	1 dokumen	397.756.040	1 dokumen	437.531.644	1 dokumen				
		Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	70%	100%	214.835.811	100%	474.649.480	100%	299.881.975	100%	545.096.500	100%	599.606.000	100%	659.566.800	100%	2.793.636.566	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Prosentase SPM yang diterbitkan SP2D	95%	100%	214.835.811	100%	474.649.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	-	-	-	-	1 Dokumen	299.881.975	1 Dokumen	545.096.500	1 Dokumen	599.606.000	1 Dokumen	659.566.800	1 Dokumen	2.793.636.566			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	144 orang	0	144 orang	0	144 orang	0	144 orang	0	144 orang	0	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi		
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	812.000.700	100%	784.958.730	100%	566.744.185	100%	1.019.672.500	100%	1.065.639.750	100%	1.112.203.000	100%	5.361.218.865		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	20 laporan	20 laporan	710.525.700	20 laporan	606.461.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		-	-	-	-	20 Laporan	357.200.000	20 Laporan	660.000.000	20 Laporan	670.000.000	20 Laporan	680.000.000	20 Laporan			3.004.186.930
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	1. Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi yang dilaksanakan 2.Bimtek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	1.12 kali 2.0 kali	1.12 kali 2.1 kali	101.475.000	1.12 kali 2.1 kali	178.497.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	-	-	-	12 Dokumen	209.544.185	12 Dokumen	359.672.500	12 Dokumen	395.639.750	12 Dokumen	432.203.000	12 Dokumen	1.677.031.935			
		Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	100%	748.037.226.907	100%	713.470.931.640	100%	670.399.933.388	100%	773.706.119.122	100%	851.076.731.035	100%	936.184.404.138	100%	4.692.875.346.230	Bidang Anggaran	
		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase realisasi penyaluran subsidi	-	100%	5.880.000.000	100%	2.520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	-	-	-	4 Laporan	2.520.000.000	4 Laporan	2.520.000.000	4 Laporan	2.520.000.000	4 Laporan	2.520.000.000	4 Laporan			18.480.000.000
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi Dana Darurat	100%	100%	75.110.000.000	100%	28.453.920.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	-	4 Laporan	16.204.000.000	4 Laporan	87.900.000.000	4 Laporan	96.942.000.000	4 Laporan	100.000.000.000	4 Laporan	404.609.920.991		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi Dana Bagi Hasil	100%	100%	103.475.932.807	100%	113.236.814.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	4 Laporan	118.563.673.188	4 Laporan	125.393.864.411	4 Laporan	137.933.250.853	4 Laporan	158.614.775.940	4 Laporan	757.218.311.467		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase realisasi Bantuan Keuangan	100%	100%	653.571.294.100	100%	569.260.196.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	-	-	-	-	-	4 Laporan	533.112.260.200	4 Laporan	557.892.254.711	4 Laporan	613.681.480.182	4 Laporan	675.049.628.200	4 Laporan	3.602.567.113.774		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Bantuan Keuangan																	
2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1. Persentase aset tetap tanah yang telah; bersertifikat 2. Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum; 3. Prosentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD; 4.Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses.	a. 18,22% b. 100% c. 100% d. 100%	a. 32,81% b. 100% c. 100% d. 100%	3.066.199.196	a. 49,45% b. 100% c. 100% d. 100%	8.373.858.318	a. 66,13% b. 100% c. 100% d. 100%	4.055.685.237	a. 82,81% b. 100% c. 100% d. 100%	3.383.540.200	a. 99,49% b. 100% c. 100% d. 100%	3.388.540.200	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	3.393.540.200	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	25.661.363.351	Bidang Aset	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN 2. Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses 3.Jumlah PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD 4. Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.066.199.196	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.985.980.830	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	4.055.685.237	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.383.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.388.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	3.393.540.200	a.100% b. 100% c. 48 PD d. 100%	25.661.363.351	Bidang Aset	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jml Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	284.365.000	2 Laporan	512.343.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Penatausahaan BMD	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	2 Laporan	364.080.000	2 Laporan	526.805.000	2 Laporan	526.805.000	2 Laporan	526.805.000	2 Laporan	2.741.203.500			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	a.Jumlah permohonan pemanfaatan BMD yang diproses b.Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	a.20 BMD b.1 dokumen	672.144.996	a.20 BMD b.1 dokumen	1.062.083.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Perencanaan dan pemanfaatan BMD		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	1 Dokumen	1.249.775.237	1 Dokumen	631.875.200	1 Dokumen	636.875.200	1 Dokumen	641.875.200	1 Dokumen	4.894.629.263			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	a. Berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN b.Jumlah pemindahtanganan BMD yang diproses	a.108 berkas b. 5berkas	a.1000 berkas b. 5 berkas	2.109.689.200	a.400berkas b.5 berkas	6.799.431.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	1 Laporan	2.441.830.000	1 Laporan	2.441.830.000	1 Laporan	2.686.013.000	1 Laporan	2.441.830.000	1 Laporan	18.920.623.588			
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	80%	13.515.163.214	80%	14.547.884.868	80%	15.512.841.479	80%	14.790.470.157	80%	15.946.134.173	80%	18.138.556.471	80%	92.451.050.362	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b.Jumlah rekomendasi hasil	a.2 Tahapan b.1 Rekomendasi	a.2 Tahapan b.1	60.000.000	a.2 Tahapan b.1 Rekomendasi	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		Rekomendasi															
			a.Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan b.Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	-	-	-	-	a.5 Dokumen b.8 Dokumen	5.900.000	a.5 Dokumen b.8 Dokumen	5.900.000	a.5 Dokumen b.8 Dokumen	5.900.000	a.5 Dokumen b.8 Dokumen	6.500.000	a.5 Dokumen b.8 Dokumen	90.100.000	Sekretariat		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	5.900.000	2 dokumen	5.900.000	2 dokumen	5.900.000	2 dokumen	6.500.000	2 dokumen		90.100.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90,77%	80,00%	9.579.901.881	80%	10.276.064.370	90%	10.270.423.671	90%	10.270.423.671	90%	11.297.466.038	90%	12.427.212.642	90%	64.121.492.273	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	9.579.901.881	12 Bulan	10.276.064.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	68 Orang/Bulan	10.270.423.671	68 Orang/Bulan	10.270.423.671	68 Orang/Bulan	11.297.466.038	68 Orang/Bulan	12.427.212.642	68 Orang/Bulan		64.121.492.273	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan /bimtek/sosialisasi/ workshop	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
			Persentase ASN yang disiplin	-	-	-	-	-	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	80%	-	85%	-	90%	200.000.000	90%	200.000.000			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	68 orang	220.000.000	68 orang	242.000.000	68 orang	266.200.000	68 orang	728.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	80%	1.033.528.417	80%	1.674.016.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
			Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	90	1.332.897.086	90	2.818.042.437	90	3.099.846.681	90	3.409.831.349	90	13.368.162.117		Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	14 Jenis	20 Jenis	24.286.050	20 Jenis	24.027.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	34.526.607	1 Paket	29.073.563	1 Paket	31.980.919	1 Paket	35.179.011	1 Paket			179.073.888
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	40 jenis	175.834.978	40 jenis	248.502.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	123.746.759	2 Paket	293.126.660	2 Paket	322.439.326	2 Paket	354.683.259	2 Paket			1.518.333.582
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	220.600.000	12 Bulan	188.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	228.000.000	1 Paket	310.486.000	1 Paket	341.534.600	1 Paket	375.688.060	1 Paket			1.664.588.660



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	29 Jenis	25 jenis	27.932.239	25 Jenis	24.348.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	13.387.349	1 Paket	29.461.898	1 Paket	32.408.088	1 Paket	35.648.897	1 Paket	163.187.147		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	62 Buah	792 Buah	2.400.000	792 Buah	2.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	792 Dokumen	2.280.000	792 Dokumen	6.016.120	792 Dokumen	6.617.732	792 Dokumen	7.279.505	792 Dokumen	27.113.357		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	10 Kotak	1 Tahun	10.085.000	429 Kotak	10.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	4 Laporan	11.875.000	4 Laporan	12.202.850	4 Laporan	13.423.135	4 Laporan	14.765.449	4 Laporan	72.436.434		
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	a.12 Bulan b.12 Bulan	a.12 Bulan b.12 Bulan	572.390.150	a.12 Bulan b.12 Bulan	1.176.252.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	4 Laporan	919.081371	4 Laporan	1.956.175.346	4 Laporan	2.151.792.881	4 Laporan	2.366.972.169	4 Laporan	9.142.664.050		
		Penatausahaan arsip dinamis pada PD	Jumlah arsip yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1000 Dokumen	181.500.000	1000 Dokumen	199.650.000	1000 Dokumen	219.615.000	1000 Dokumen	600.765.000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	87 Unit	70 Unit	1.098.402.942	34 unit	482.438.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
			Jumlah BMD yang diadakan	-	-	-	-	-	2 jenis	1.222.521.322	3 jenis	206.716.521	3 jenis	227.388.173	3 jenis	250.126.990	3 jenis	3.487.594.449		Sekretariat
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	0	30 Unit	159.061.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 paket	114.052.500	2 paket	3.927.781	2 paket	4.320.559	2 paket	4.752.615	2 Paket			286.115.080
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	0	1 gedung	327.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	135.520.000	1 unit	149.072.000	1 unit	163.979.200	1 unit			163.979.200
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain	80 Unit	40 Unit	639.341.317	32 unit	155.398.501	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a.Jumlah mobil angkutan barang yang diadakan b.Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	a.1 unit b.1 unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	13 unit	1.108.468.822	10 unit	67.268.740	10 unit	73.995.614	7 unit	81.395.175	5 unit	775.611.200			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	80%	80%	1.383.329.974	80%	1.542.990.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
			Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	100%	2.235.754.400	100%	1.788.764.296	100%	1.967.640.726	100%	2.164.404.798	100%	11.082.885.044	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	10416 surat	7000 Surat	1.500.000	7000 Surat	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.996.500	4 Laporan	2.196.150	4 Laporan	2.415.765	4 Laporan		10.608.415	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	412.453.374	12 Bulan	489.363.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Laporan	768.000.000	4 Laporan	685.198.800	4 Laporan	753.718.680	4 Laporan	829.090.548	4 Laporan		3.937.824.652	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a.Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar b.Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar c.Jumlah tenaga	a.36 Orang b.5 Orang c.6 Orang	a.36 Orang b.5 Orang c.6 Orang	969.376.600	a.51 Orang b.5 Orang c.6 Orang	1.052.127.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			non ASN yang terbayar																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	4 Laporan	1.466.754.400	4 Laporan	1.101.568.996	4 Laporan	1.211.725.896	4 Laporan	1.332.898.485	4 Laporan	7.134.451.977			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	360.000.000	100%	566.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi	-	-	-	-	100%	445.345.000	100%	538.450.000	100%	592.295.000	100%	651.524.500	100%	3.154.089.500	Sekretariat		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a.9 Unit b.9 Unit	a.9 Unit b.9 Unit	80.000.000	a.9 Unit b.9 Unit	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	20 unit	195.000.000	9 Unit	127.050.000	9 Unit	139.755.000	9 Unit	153.730.500	9 Unit	800.535.500			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	280.000.000	1 Gedung	271.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1 Unit	120.345.000	1 Unit	181.500.000	1 Unit	199.650.000	1 Unit	219.615.000	1 Unit	1.272.585.000			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			yang Dipelihara/Direhabilitasi																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	6 Jenis	6 Jenis	0	6 Jenis	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	40 Unit	130.000.000	40 Unit	229.900.000	40 Unit	252.890.000	40 Unit	278.179.000	40 Unit	1.080.969.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **“Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**. Dengan Tujuan RPJMD yakni **“Meningkatnya Tata Kelola Pemeritahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”**. Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021–2026

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran: 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital																			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas Laporan BPK	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD	(Jml OPD yg laporan keuangannya sesuai SAP/Jml OPD)x100%
										b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	%	99,752 %	99,85 %	99,96%	99,96%	99,96%	99,97%	Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa: a.Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN) b.Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) c.Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima	(Jml aset tetap terdokumentasi legal/Jml aset tetap)x100%



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Sasaran: 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital																															
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai SAKIP	Predikat	A (82,3)	A (83,46)	A(84)	A (84)	A(85)	A(85)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan SAKIP adalah terlaksananya penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.	Sesuai dengan hasil LHE SAKIP dengan komponen penilaian sbb: <table><tr><td>Komponen</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi AKuntabilitas Kinerja</td><td>25</td></tr></table>	Komponen	Bobot	Perencanaan Kinerja	30	Pengukuran Kinerja	30	Pelaporan Kinerja	15	Evaluasi AKuntabilitas Kinerja	25		
										Komponen	Bobot																				
Perencanaan Kinerja	30																														
Pengukuran Kinerja	30																														
Pelaporan Kinerja	15																														
Evaluasi AKuntabilitas Kinerja	25																														
										b. Nilai IPP	Predikat	3,99 (B)	A-(4,03)	A-(4,04)	A-(4,07)	A-(4,1)	A-(4,15)	Indeks penilaian publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia	Sesuai dengan LHE IPP dengan kriteria penilaian: <table><tr><td>Range Nilai</td><td>Kategori</td><td>Makna</td></tr><tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0-1,00	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0-1,00	F	Gagal																													
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51-2,00	D	Buruk																													



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Sasaran: 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital																					
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target capaian kinerja						Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
																			2,51-3,00	C	Cukup
																			3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)
																			3,51-4,00	B	Baik
																			4,01-4,50	A-	Sangat Baik
																			4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
										c. Nilai IKM/SKM	Predikat	Baik (84,65)	Sangat Baik (96,06)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan	Berdasarkan hasil penilaian SKM dengan kriteria penilaian:		
																			Nilai Interval	Kategori	
																			1,00-2,5996	Tidak Baik	
																			2,60-3,064	Kurang Baik	
																			2,0644-3,532	Baik	
																			3,5324-4,00	Sangat Baik	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

			Sasaran: 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital																
N o	Tujuan	Indikat or Tujuan	Target capaian kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satua n	Target capaian kinerja						Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
			202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		kebutuhannya	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Pembuatan Renstra terdapat kesinambungan antara visi, misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyelaraskan pada Perencanaan Strategis yang akan dibuat oleh PD. Hal ini dilakukan sebagai tujuan tercapainya kinerja yang optimal untuk PD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan dokumen ini merujuk pada kinerja pembangunan secara umum yaitu adanya dua rangkaian proses secara teknokratis dan politis. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD karena keduanya keterkaitan yang begitu erat baik pada konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.

Ketika ada regulasi perubahan dalam nomenklatur pada BPKAD, maka dapat dilakukan review Renstra. Akhir kata semoga Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKAD.

Sidoarjo, 31 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001



BERITA ACARA

HASIL PERUBAHAN RENSTRA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

Nomor : 000/2/438.6.2/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun 2024, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/12/438.6.2/2023, tanggal 04 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Tetap
Indikator : a. Opini atas Laporan BPK	Indikator : a. Opini atas laporan BPK	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	
Sasaran 1 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Sasaran 1 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Tetap
Indikator Kinerja: a. Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	Indikator Kinerja : a. Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	Tetap
-	Sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Indikator Kinerja 1. Nilai SAKIP PD 2. Nilai IPP 3. Nilai SKM	Tambahan Sasaran Baru

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	$\frac{\text{Jml OPD yang laporan keuangannya sesuai}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD
Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	$\frac{\text{Jml aset tetap terdokumentasi legal}}{\text{Jumlah aset tetap}} \times 100\%$	Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa: a. Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN) b. Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) c. Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima
Nilai SAKIP PD	Sesuai dengan hasil LHE SAKIP dengan kriteria penilaian sebagai berikut:	
	Bobot Nilai	Kategori
	100	AA
	90	A
	80	BB
	70	B
	60	CC
	50	C
	30	D
	0	E
Nilai IPP	Sesuai dengan LHE IPP dengan kriteria penilaian:	
	Range Nilai	Kategori Makna
	0-1,00	F Gagal

	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi
	1,51-2,00	D	Buruk	
	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	
	2,51-3,00	C	Cukup	
	3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)	
	3,51-4,00	B	Baik	
	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	
	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	
Nilai SKM	Berdasarkan hasil penilaian SKM dengan kriteria penilaian:			SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
	Nilai Interval	Kategori		
	1,00-2,5996	Tidak Baik		
	2,60-3,064	Kurang Baik		
	2,0644-3,532	Baik		
	3,5324-4,00	Sangat Baik		

Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
daerah									
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD
	Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	0	0	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
Administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang disiplin	%	0	0	0	80%	85%	90%	90%
		%	0	0	0	80%	85%	90%	90%
Administrasi umum perangkat daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	0	0	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	0	0	15 Unit	13 Unit	13 Unit	10 Unit	10 Unit
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	0	0	80%	80%	80%	80%	80%
Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%

e. Rincian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sebelum Perubahan									
SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPAS yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perda APBD yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Raperbup APBD dan Perbup APBD yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	a. Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	b. Jumlah Dokumen Perubahan KUA-PPAS yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	c. Jumlah Dokumen Raperda PAPBD dan Perda PAPBD yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	d. Jumlah Dokumen Raperbup PAPBD dan Perbup PAPBD yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi dan kebijakan bidang anggaran yang disusun/ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Prosentase SPM yang diterbitkan SP2D	%	95	100	100	100	100	100	100
Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	Laporan	20	20	20	20	20	20	20
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	1.Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12
	2.Bimtek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi	Persentase realisasi penyaluran subsidi	%	100	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Subsidi									
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi Dana Darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi Dana Bagi Hasil	%	100	100	100	100	100	100	100
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase realisasi Bantuan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jml Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	a.Jumlah permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	BMD	20	20	20	20	20	20	20
	b.Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah	a. Berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN	Berkas	1000	400	400	400	400	400	400
	b.Jumlah pemindahtanganan BMD yang diproses	Berkas	5	5	5	5	5	5	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	20	20	20	20	20	20	20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	40	40	40	40	40	40	40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	25	25	25	25	25	25	25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Buah	792	792	792	792	792	792	792
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Kotak	429	429	429	429	429	429	429
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Pengadaan	Jumlah meubeleur yang	Unit	30	1	2	2	2	2	2

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A
				2022	2023	2024	2025	2026	
Mebel	diadakan								
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Gedung	-	1	1	1	1	1	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain	Unit	40	32	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan	a.Jumlah mobil angkutan barang yang diadakan	Unit	1	-	-	-	-	-	-
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	b.Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Unit	1	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	-	-	32	32	32	32	32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a.Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	36	51	51	51	51	51	51
	b.Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	5	5	5	5	5	5	5
	c.Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	6	6	6	6	6	6	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Unit	9	9	9	9	9	9	9
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit	9	9	9	9	9	9	9
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung	1	1	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jenis	6	6	-	-	-	-	-

f. Rincian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan Setelah Perubahan

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Koordinasi dan	Jumlah Peraturan	Dokumen	-	-	6	6	6	6	6

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	-	-	6	6	6	6	6
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	144	144	144	144	144
Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	-	-	20	20	20	20	20
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	-	-	20	20	20	20	20
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Analisis Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A
				2022	2023	2024	2025	2026	
dan Penyaluran Bantuan Keuangan	dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	-	2	2	2	2	2
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	-	-	1	1	1	1	1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	-	68	68	68	68	68
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	68	68	68	68	68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	2	2	2	2	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	792	792	792	792	792
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	2	2	2	2	2
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	Unit	-	-	1	1	1	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	13	10	10	7	7
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	-	-	4	4	4	4	4

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A
				2022	2023	2024	2025	2026	
Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	20	9	9	9	9
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Gedung	-	-	1	1	1	1	1
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	40	40	40	40	40

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 197203171996022001

CHUSNULINAYAH,SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001